

PENERAPAN SISKEUDES BERBASIS *CASH MANAGEMENT SYSTEM* DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA

Bq Dini Ulandari¹⁾, Rr. Sri Pancawati Martiningsih²⁾

^{1,2}Universitas Mataram, Jl. Majapahit 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat

¹⁾email: diniulandaribaiq@gmail.com

²⁾email: pancawati@unram.ac.id

Abstract

This study aims to explore the implementation of SISKEUDES that emphasizes the Cash Management System (CMS) to improve village financial accountability in Wanasaba Lauk Village, Wanasaba Sub-district, East Lombok Regency. The approach used in this research is descriptive qualitative method. Data collection methods in this study were conducted by observation, interview, and documentation. The informants in the study were the village head, the village treasurer, and the head of planning affairs. The research findings show that the implementation of CMS-based SISKEUDES in Wanasaba Lauk Village has been running well according to the principles of village fund management regulated by the Permendagri Number 20 year 2018. However, there are still problems or shortcomings. Furthermore, regarding accountability assessed by vertical and horizontal accountability indicators, it can be stated that it is increasingly accountable. This study is expected to contribute to expanding readers' knowledge about the implementation of a cash management system-based village financial system. The limitation of this study is that it only examines the implementation of a CMS-based village-level financial system in Wanasaba Lauk Village, Wanasaba Sub-district, East Lombok, so the findings obtained cannot be generalized to other locations.

Keywords: *Accountability, Cash Management System, Village Financial Management, Village Financial System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi SISKEUDES yang menekankan pada *Cash Management System* (CMS) untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, bendahara desa, dan kepala urusan perencanaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes berbasis CMS di Desa Wanasaba Lauk telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Namun demikian, masih terdapat permasalahan atau kekurangan. Selanjutnya mengenai akuntabilitas yang dinilai dari indikator akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat dinyatakan semakin akuntabel. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperluas ilmu pembaca mengenai implementasi aplikasi siskeudes berbasis *cash management system*. Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya meneliti implementasi aplikasi siskeudes tingkat desa berbasis CMS di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, sehingga temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi ke lokasi lain.

Keywords: *Akuntabilitas, Cash Management System, Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Keuangan Desa*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan suatu program di tingkat desa menuntut pemanfaatan sumber daya secara maksimal guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan desa memegang peranan krusial yang tidak boleh diabaikan. Proses pengelolaan tersebut mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana (Utami et al., 2023)

Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa mencakup serangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan tersebut harus berlandaskan pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta kepatuhan dan kedisiplinan terhadap alokasi anggaran.

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Agustin (2024) Kabupaten Lombok Timur menerima peningkatan alokasi dana desa di mana tahun 2023 dana desa yang didapat sebesar Rp. 277,8 miliar dan Rp.281,23 miliar pada tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp.3,3 miliar. Dengan meningkatnya dana desa yang diterima, pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang besar. Hal tersebut membuat pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas agar memenuhi kewajibannya dalam pengelolaan dana desanya.

Untuk mendorong prinsip tanggung jawab fiskal tingkat desa, aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dikembangkan melalui kerja sama Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri dan pertama kali dirilis pada tahun 2015. Meskipun aplikasi tersebut tidak secara langsung mengelola keuangan, aplikasi SISKEUDES dapat dikembangkan untuk menjadikan sistem pengelolaan keuangan desa lebih efisien serta akuntabel (Arfi & Sandari, 2023).

Aplikasi SISKEUDES ini sebelumnya disebut dengan SIMDA yaitu aplikasi dasar yang dirancang BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Fitur yang disediakan sangat mudah diaplikasikan karena bersifat sederhana dan mudah dipahami, sehingga dalam pengoperasiannya pemerintah desa tidak terlalu kesulitan Wibowo et al, (2020). Dengan adanya kemudahan yang diberikan aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Sebelum SISKEUDES ini diluncurkan dalam menyusun anggaran, akuntansi, dan laporan keuangan, banyak pemerintah desa memanfaatkan *Microsoft Excel*, yang sering kali tidak dapat diandalkan, sehingga menghambat pemerintah daerah untuk menilai APBDes dan dokumen keuangan desa secara efektif. Aplikasi sistem keuangan desa yang dibuat oleh BPKP dengan fokus pada pemerintah desa tentunya dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa dan pembuatan laporan keuangan sebagai lampiran LKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengingat pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan Peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk akuntabilitas keuangan desa (Arfi & Sandari, 2023).

Semua desa dituntut untuk menggunakan aplikasi SISKEUDES ini, begitupun Desa Wanasaba Lauk yang sudah menerapkan SISKEUDES sejak tahun 2019. Penerapan aplikasi tersebut berjalan dengan lancar, namun masih ada kendala yang dialami seperti sering terjadinya gangguan *error* pada sistem karena akses internet yang kurang stabil akibatnya operator kesulitan dalam input data anggaran (wawancara awal dengan operator Siskeudes desa Wanasaba Lauk). Lalu terkait akuntabilitas keuangan desa di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, SISKEUDES ini belum mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, dilihat dari keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban dan belum akuntabel terhadap masyarakat desanya.

Menurut penelitian terkait aplikasi SISKEUDES yang diteliti oleh Diana et al, (2023), Faizah & Sari, (2022) dan Pujiani et al, (2022) menyatakan bahwa sistem keuangan sudah diterapkan cukup efektif, namun masih ada kendala terkait error akibat koneksi internet yang tidak stabil. Sedangkan penelitian terkait akuntabilitas dibahas oleh Aeni et al, (2023) dan Indrianti et al, (2020) menunjukkan bahwa ada kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang menyebabkan kurang akuntabilitasnya keuangan desa, seperti kurang lengkapnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban) serta keterlambatan pencairan dana dan keterlambatan laporan pertanggungjawaban desa.

Mengingat pentingnya pengoperasian sistem keuangan desa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah terus melakukan inovasi untuk memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan berbagai dana desa. Salah satunya adalah pengembangan SISKEUDES yang terintegrasi dengan *Cash Management System* (CMS) yang memungkinkan seluruh transaksi keuangan desa diproses melalui mekanisme remitansi langsung dan dicatat dalam rekening remitansi desa untuk dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, desa saat ini tidak menerima atau menyimpan uang tunai dalam jumlah besar, sehingga meminimalkan risiko penipuan.

Penerapan kebijakan transaksi non tunai oleh CMS dalam SISKEUDES di level desa adalah langkah strategis untuk memodernisasi dan memperbaiki pengelolaan keuangan desa di Indonesia. Desa Wanasaba Lauk merupakan salah satu desa yang baru saja mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang mengandalkan sistem manajemen kas (CMS) dilaksanakan di tingkat pemerintahan desa serta dampaknya dalam meningkatkan tanggung jawab keuangan desa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperluas pengetahuan pembaca mengenai penerapan sistem keuangan desa yang berbasis *cash management system*.

B. KAJIAN LITERATUR DAN TEORI

1. *Stewardship Theory*

Penelitian ini didasarkan pada teori utama yaitu teori *stewardship*, yang merupakan pengembangan dari teori keagenan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991 untuk menggambarkan kondisi ketika manajer tidak terlalu terdorong oleh kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pencapaian tujuan organisasi demi kemaslahatan bersama (Sari & Nirwana, 2023).

Menurut Arfiansyah (2020), teori *stewardship* berasumsi bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara kesuksesan organisasi dalam menjaga serta meningkatkan kinerjanya dengan kepentingan serta tingkat kepuasan pemilik. Dalam konteks pemerintahan desa, kepala desa berperan sebagai pengelola *steward*, sementara masyarakat memposisikan diri sebagai pihak pemilik (prinsipal) atas dana yang ada. Hubungan antara keduanya tercermin dalam tanggung jawab kepala desa dalam mengelola dana desa, di mana pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyajikan dan membuka informasi secara transparan kepada masyarakat sebagai pengguna informasi yang membutuhkannya dalam pengambilan keputusan.

Penelitian ini memanfaatkan teori kepentingan teori *stewardship* karena teori ini menekankan pada keperluan kolektif di atas keperluan individu, yang mendorong para pihak atas untuk memprioritaskan dan meningkatkan tujuan organisasi sambil terdorong untuk bertindak demi kepentingan terbaik para kepala organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, *steward* diidentifikasi sebagai aparat desa dan prinsipal diakui sebagai masyarakat. Terkait dengan aplikasi SISKEUDES, SISKEUDES ini berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi keinginan dari pengelola, yaitu pemerintah desa, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

2. *Pengelolaan Keuangan Desa*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan komprehensif yang mencakup tahap perencanaan,

pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan. Dalam praktiknya, pengelolaan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas, ketertiban, serta disiplin dalam penggunaan anggaran.

Menurut Indrianti et al, (2020), pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada Peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari transparansi serta akuntabilitas dalam perencanaan pendapatan dan belanja desa. Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes, pemerintah desa berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terbagi dalam beberapa langkah: langkah pertama perencanaan, di mana pemerintah desa merancang rencana pembangunan desa; kedua, tahap pelaksanaan, pemerintah melaksanakan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan; ketiga, tahap penatausahaan, yaitu di mana pemerintah desa menentukan bendahara desa; keempat, tahap pelaporan, di mana pemerintah desa menyusun laporan keuangan desanya; dan kelima, tahap pertanggungjawaban.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, tugas, dan hasil kerja kepada pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Arfiansyah, (2020) tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan amanah yang diberikan kepada kepala desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Penerapan prinsip akuntabilitas diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas kinerja aparatur desa sekaligus menjadi tolok ukur kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa.

Indikator akuntabilitas menurut Maharani & Akbar (2020) meliputi akuntabilitas vertikal, yaitu tanggung jawab manajerial kepada badan otoritas yang lebih tinggi seperti pemerintah daerah, yang kemudian bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Jadi indikator selanjutnya adalah akuntabilitas horizontal, yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat desa. Dalam akuntabilitas horizontal, pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan tugas atau wewenang yang diberikan oleh masyarakat.

4. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Menurut Faizah & Sari (2022) Sistem keuangan desa merupakan suatu aplikasi yang digunakan mulai dari tahap perencanaan keuangan desa hingga tahap pelaporan atau pertanggungjawaban untuk memenuhi peraturan perundang-undangan desa dan mengelola dana pusat desa. SISKEUDES dibuat oleh BPKP untuk membantu penegakan peraturan desa dan pengelolaan keuangan desa.

5. Cash Managment System (CMS)

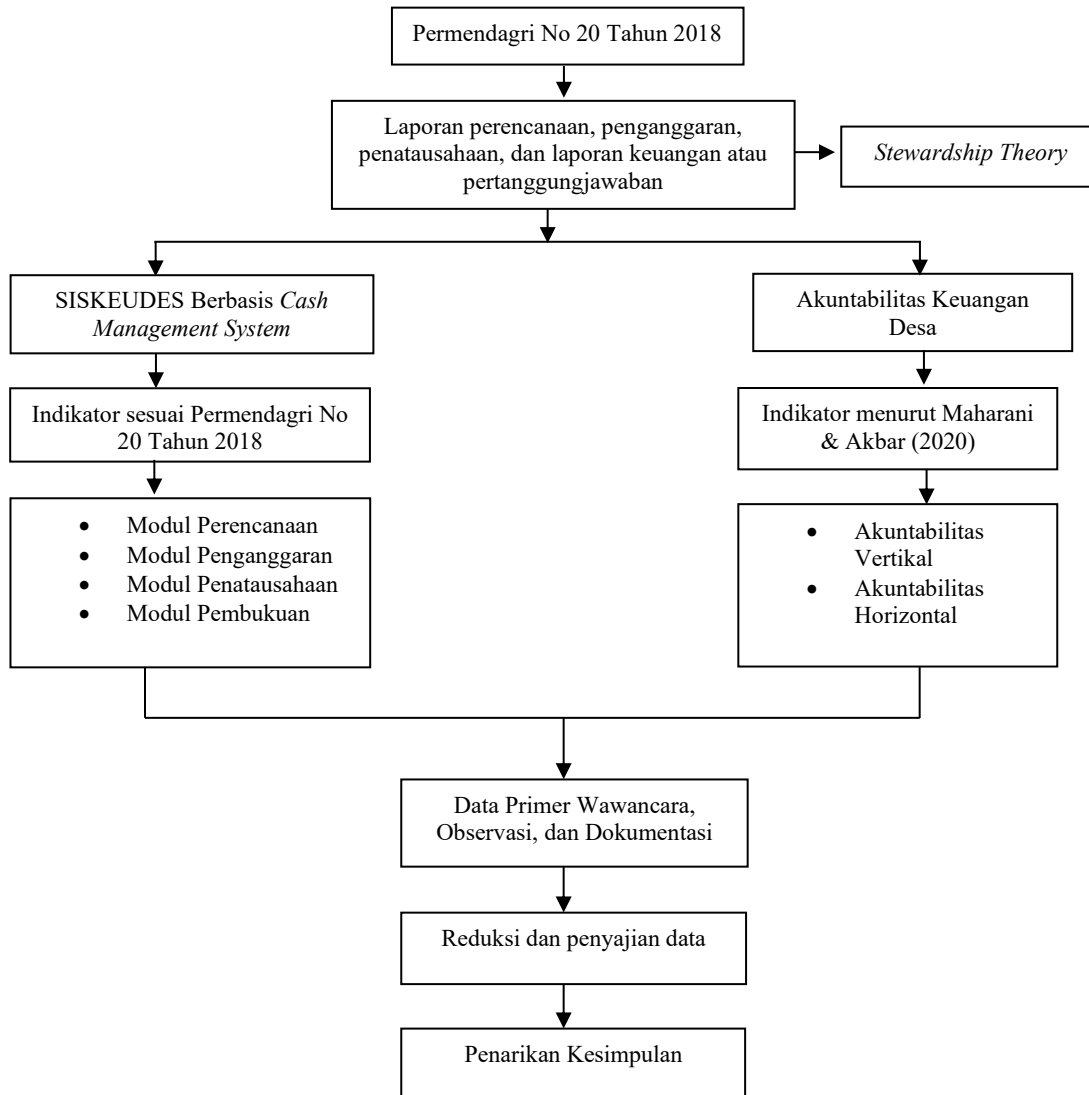
Menurut Rosalyni & Khabibah (2020) *Cash Management System* adalah layanan transaksi *non-tunai* yang diterapkan untuk klien menggunakan fasilitas *online*, yang mendorong lembaga publik untuk mengurangi pemantauan dan implementasi pemantauan impor palsu dalam manajemen kas oleh pelanggan yang melakukan transaksi keuangan waktu nyata dan *online*.

Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dengan menggunakan sistem manajemen kas (CMS) untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan desa, yang akan dianalisis menggunakan indikator penerapan sistem keuangan desa sesuai dengan Peraturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 serta indikator akuntabilitas merujuk pada penelitian cMaharani & Akbar (2020). Studi ini memanfaatkan teori *stewardship*, di mana teori ini dapat dianalisis oleh pemerintah desa dari perspektif perencanaan, penganggaran, manajemen, dan pelaporan terkait akuntabilitas, sehingga pemerintah desa

membutuhkan sistem keuangan desa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memastikan bahwa pemerintah desa menyampaikan laporan keuangannya dengan transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka gambaran kerangka berpikir yang diajukan penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: data yang diolah (2025)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif dianggap relevan karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai implementasi aplikasi siskeudes desa berbasis *cash management system* dalam upaya

meningkatkan akuntabilitas keuangan desa di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba. Jenis data yang diterapkan dalam studi ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan perangkat desa Wanasaba Lauk. Wawancara dilakukan sebanyak tiga kali pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2024. Sebelum melakukan wawancara dilakukan observasi terlebih dahulu untuk mengetahui penerapan SISKEUDES sebelum adanya fitur CMS dan menentukan narasumber yang terlibat langsung dengan pengoperasian aplikasi SISKEUDES. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah tiga orang, yang meliputi Kepala Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Urusan Perencanaan yang juga berperan sebagai operator sistem keuangan desa. Dalam proses wawancara, dilakukan pencatatan berupa rekaman audio agar semua informasi dapat dianalisis secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja Miles dan Huberman tahun 1992. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, yaitu dengan merangkum hal-hal penting yang berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian, lalu selanjutnya melakukan penyajian data, yaitu menjelaskan gambaran umum hasil penelitian secara lugas dan ringkas, lalu langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan, yaitu dengan menarik kesimpulan hasil data yang sudah disajikan sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan penilaian kredibilitas dengan memperluas observasi, meningkatkan konsistensi, memasukkan bahan referensi, dan triangulasi data untuk memastikan bahwa hasil wawancara dari tempat penelitian adalah valid.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SISKEUDES berbasis CMS di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba

SISKEUDES adalah aplikasi yang di desain agar memudahkan pemerintah desa dalam proses pengelolaan keuangan agar lebih akuntabilitas. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan tujuan utama meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa.

Desa memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola dan mendorong peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemandirian yang lebih tinggi dalam mengelola pemerintahan, sumber daya alam, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan aset milik desa.

Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, mulai menerapkan Siskeudes pada tahun 2019. Dengan jumlah pendapatan total sebesar Rp.2.037.550.391,00

Tabel 1
Data Perubahan APB Desa Pemerintah Desa Wanasaba Lauk Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran (RP)	
		Semula	Menjadi
1.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	104.800.000,00	107.028.000,00
4.1.1	Hasil Usaha Desa	11.800.000,00	12.778.000,00
4.1.2	Hasil Aset Desa	93.000.000,00	93.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	0,00	1.250.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	1.877.341.240,00	1.923.667.791,00
4.2.1	Dana Desa	1.110.544.000,00	1.110.544.000,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak Retribusi	131.482.726,00	76.582.740,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	635.314.514,00	736.541.051,00

4.3	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	6.854.600,00
4.3.5	Koreksi Kesalahann Belanja Tahun-tahun sebelumnya	0,00	6.354.600,00
4.3.6	Bunga Bank	500.000,00	500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.982.641.240,00	2.037.550.391,00

Sumber: Kantor Desa Wanasaba Lauk (2024)

Berdasarkan tabel 1 data perubahan APBDes tahun anggaran 2024 menunjukkan anggaran perubahan yang dikelola oleh Desa Wanasaba Lauk yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp.1.982.641.240,00 menjadi Rp.2.037.550.391,00. Anggaran tersebut dikelola menggunakan aplikasi Siskeudes dan mampu menghasilkan APBDes yang akurat karena dibuat otomatis dan terstruktur. Kaur perencanaan desa Wanasaba Lauk Bapak Lalu Danil selaku narasumber penelitian. Sebelum SISKEUDES diterapkan, pemerintah desa Wanasaba Lauk dalam mengelola keuangannya menggunakan sistem manual yaitu memanfaatkan aplikasi *Microsoft excel* yang cukup ribet dikarenakan APBDes dibuat secara manual dengan format seadanya, sehingga hasilnya kurang akurat. Namun pada tahun 2018 SISKEUDES *offline* atau sebelumnya disebut SIMDA diterapkan dan dapat memudahkan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya, namun masih ada kendala dalam pengaplikasiannya yaitu jika ada salah dalam penginputan data, operator SISKEUDES harus langsung ke pemerintah pusat untuk mengubah data yang salah. Adapun semenjak diterapkan SISKEUDES online pada tahun 2019 juga masih memiliki kendala, yaitu *server* yang *error*. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Lalu Danil selaku operator SISKEUDES pada tanggal 3 Oktober 2024:

"Jadi SISKEUDES yang offline itu sendiri itu kita pakai dari tahun 2018, lalu perubahan menjadi SISKEUDES online itu di tahun 2019, sebenarnya cukup memudahkan aplikasi ini, tetapi kendalanya ada juga, mulai dari SISKEUDES offline itu kalau kita salah saja masukan data misalnya angka yang kurang nol nya atau salah tempat mengisi data, itu saya sendiri harus jauh ke pemerintah pusat untuk mengubah data tersebut. Nah semenjak ada SISKEUDES online lumayan terbantu saya, karena ga perlu ribet lagi kalau harus ngubah data, tetapi ada juga kendalanya seringnya terjadi server error, soalnya kan jaringan yang dipake itu khusus, jadi ya itu yang bikin terlambat jadi laporan yang mau dibuat"

Mengingat pentingnya pengoperasian SISKEUDES ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, pemerintah terus melakukan inovasi untuk memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan berbagai dana desa. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah pengembangan SISKEUDES yang terintegrasi dengan *Cash Management System* (CMS). Desa Wanasaba menjadi salah satu desa yang sudah menerapkan Siskeudes berbasis CMS ini. CMS ini sendiri merupakan *Cash Management System* yang memungkinkan terjadinya transaksi *non tunai*, dimana bendahara tidak lagi memegang uang tunai, tetapi semua dana yang dicairkan langsung masuk ke rekening desa. CMS ini diterapkan di Desa Wanasaba Lauk Kecamatan Wanasaba sejak tahun 2024, tetapi masih dalam tahap percobaan yang digunakan untuk sistem penggajian saja, sedangkan dana yang lain masih dicairkan oleh bendahara lewat bank. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Anah selaku bendahara desa Wanasaba Lauk pada tanggal 22 November 2024:

"SISKEUDES CMS ini kita terapkan baru-baru tahun 2024 ini, jadi CMS ini modelnya pemerintah pusat itu bekerjasama dengan bank daerah, kalau kita disini kan bank NTB Syariah dek. Jadi CMS ini itu membuat saya tidak lagi pegang uang tunai yang sebelumnya kan saya harus pergi ke bank dulu untuk mencairkan dana, tetapi sekarang saya tidak lagi ke bank, tetapi dana yang dicairkan itu langsung masuk ke rekening perangkat desa, tetapi CMS ini masih masa

percobaan di desa ini, sesuai dengan hasil BIMTEK kemarin CMS ini kita gunakan hanya untuk cairkan gaji perangkat desa saja, sedangkan kalau dana yang lain ya tetap saya ke bank untuk cairkannya, tetapi jika ini berhasil dan berjalan lancar, kemungkinan akan diterapkan juga untuk pencairan dana yang lainnya”

Pengembangan fitur CMS ini memberikan kemudahan bagi bendahara desa dalam melakukan pencairan gaji perangkat desa karena bisa dilakukan dimana saja dan bisa diakses menggunakan *smartphone* bendahara desa. Adapun alur penggunaan CMS ini tidak terlalu sulit dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh bendahara desa Ibu Anah pada tanggal 22 November 2024:

”semenjak adanya CMS ini, saya merasa dimudahkan, soalnya kan CMS ini bisa akses kapan saja dan dimana saja lewat HP saya bisa soalnya ada website khusus Bank NTB Syariah yang bisa diakses, jadi pas waktunya udah pencairan gaji itu, awalnya operator desa membuat SPP nanti diverifikasi ke sekretaris kecamatan, terus nanti saya minta verifikasi sekretaris desa dan minta tanda tangan kepala desa, kalo sudah semua, saya mendapatkan ID pembayaran yang akan dimasukkan ke website CMS Bank NTB Syariah tadi, setelah itu dana sudah masuk ke rekening masing-masing perangkat desa.

Adapun alur CMS di SISKEUDES ini tidak jauh berbeda dengan SISKEUDES sebelum adanya CMS, perbedaan yang paling menonjol pada versi terbaru SISKEUDES ini adalah penginputan data untuk penggajian perangkat desa yaitu berupa nama perangkat desa beserta nomor rekeningnya pada modul penatausahaan. Hal ini disampaikan oleh operator desa Bapak Lalu Danil tanggal 3 Oktober 2024:

”Kalau untuk alur CMS di SISKEUDES itu sebenarnya sama saja dengan SISKEUDES sebelumnya, hanya saja yang membedakan hanya di menu penatausahaan itu, pas mau buat SPP kita perlu memasukkan data nama perangkat desa dan nomor rekeningnya, untuk alur lainnya sih sama saja dek”

Fitur-fitur yang disediakan aplikasi SISKEUDES berbasis CMS sangat mudah digunakan sehingga bisa diaplikasikan oleh pemula. Selain mudah digunakan, output berupa dokumen administrasi dan laporan dihasilkan mampu diandalkan berdasar pada ketentuan perundang-undangan.

Adapun pengelolaan keuangan desa menggunakan SISKEUDES berbasis CMS di Desa Wanasaba Lauk terdiri dari 4 modul yaitu modul perencanaan, modul penganggaran, modul penatausahaan dan modul pembukuan. Menu ini dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Adapun rincian tiap modul dijabarkan sebagai berikut :

1) Modul Perencanaan

Dalam modul ini, terdapat dua pilihan menu yaitu informasi umum desa dan Pada modul ini terdapat dua pilihan menu yaitu Informasi Umum Desa dan pilihan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan RKPD yang disusun setiap enam tahun sekali. Setelah dilakukan penelaahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), beserta informasi program dan pendanaannya, dimasukkan ke dalam aplikasi SISKEUDES.

2) Modul Penganggaran

Dalam modul ini terdapat opsi untuk memasukkan data anggaran, di mana operator SISKEUDES menginput data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disusun berdasarkan kesepakatan dengan BPD mengenai RKPD. Di samping itu, terdapat pula opsi untuk memasukkan data regulasi terkait APBDes.

3) Modul Penatausahaan

Dalam modul ini terdapat opsi SPP kegiatan, di mana bendahara menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk mendokumentasikan pendapatan dan pengeluaran yang berkelanjutan serta memproses pembayaran pajak. Tindakan awal yang dilaksanakan oleh tim Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) adalah memberikan rincian biaya anggaran. kepada sekretaris desa, termasuk kuitansi atau dokumentasi transaksi lainnya untuk disahkan. Bukti tersebut akan menjadi dasar pembuatan SPP. Setelah itu, akan dikomunikasikan kepada kepala desa untuk mendapatkan persetujuan. Operator SISKEUDES selanjutnya melakukan input SPP dan pencairan yang juga dilakukan di menu penatausahaan.

Tahap selanjutnya yaitu setelah SPP dibuat semua bukti transaksi didokumentasikan sebagai bukti, setelah itu bendahara meminta verifikasi ke sekretaris desa dan meminta tanda tangan kepala desa. Langkah selanjutnya tahap pencairan dengan mengklik menu pencairan SPP di menu penatausahaan, kemudian bendahara akan mendapat ID pembayaran yang harus dimasukkan ke website CMS Bank NTB Syariah. Setelah semua langkah sebelumnya selesai, maka gaji baru bisa masuk ke rekening perangkat desa yang bersangkutan.

4) Modul Pembukuan

Pada modul ini digunakan untuk membuat laporan keuangan desa yang secara otomatis akan tersusun jika modul perencanaan, modul penganggaran, dan modul penatausahaan sudah lengkap. Hal ini mempermudah pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan setiap satu periode. Dalam modul akuntansi ini juga terdapat menu penyesuaian dirancang mencatat perubahan pada aset dan kewajiban, serta mengoreksi pendapatan dan pengeluaran yang dicatat.

Dengan kemudahan fitur yang disediakan SISKEUDES berbasis CMS ini menyederhanakan proses bagi pemerintah desa dalam hal melakukan pencairan gaji untuk perangkat desa. Hal ini tentu saja meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam mengelola dana desa. Namun demikian, dibalik kemudahan ini, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterlibatan dua pihak yaitu bendahara dan operator SISKEUDES yang kadang *miss communication* dan kurangnya pelatihan yang diberikan pemerintah terkait CMS ini ke operator SISKEUDES, serta *error system* yang kerap terjadi sehingga menghambat pencairan gaji perangkat desa. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Lalu Danil selaku operator SISKEUDES pada tanggal 3 Oktober 2024:

"Kalau kendala sejauh ini tidak terlalu membuat khawatir, ya kendala seperti miss communication antara saya dengan bendahara, karena kan saya memegang CMS ini di SISKEUDES, nah bendahara memegang CMS website Bank NTB Syariah untuk mendapatkan ID pencairan dana itu, kendala ini terjadi karena kemarin saya tidak ikut BIMTEK hanya kepala desa dan bendahara saja yang diberikan hadir, jadi saya belum terlalu paham bagaimana alur lengkap terkait CMS yang di website itu"

Berdasarkan hasil dan analisis yang dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerapan SISKEUDES berbasis CMS di Desa Wanasaba Lauk ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dilihat dari modul yang disediakan di aplikasi mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan tingkat desa. Namun dibalik kemudahan yang disediakan, juga masih ada beberapa kendala yang dihadapi operator desa terkait pengaplikasian SISKEUDES berbasis CMS ini seperti keterlibatan dua pihak yaitu bendahara dan operator yang

kadang *miss communication* dan kurangnya pelatihan yang diberikan pemerintah terkait CMS ini ke operator SISKEUDES, serta *error system* yang kerap terjadi sehingga menghambat pencairan gaji perangkat desa.

Dampak SISKEUDES Berbasis CMS Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan, tugas, dan hasil kerja kepada pihak yang berkepentingan. Menurut Aeni et al, (2023) salah satu cara pemerintah menunjukkan transparansi keuangan melalui akuntabilitas meningkatkan kinerja pemerintah. Konsekuensinya, karena rakyat memilih pemerintah (kepala desa) kebijakan atau rencana kerja harus mencerminkan kepentingan dan tanggung jawab masyarakat. Ini seharusnya menunjukkan seberapa baik penyelenggara pelayanan memenuhi standar publik.

Seiring kemajuan teknologi, PMD bekerja sama dengan pemerintah negara berupaya mengembangkan sistem keuangan tingkat desa berdasarkan sistem pengelolaan kas yang dapat lebih meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan tingkat desa, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan dana tingkat desa. Dengan dikembangkannya aplikasi SISKEUDES berbasis CMS ini diharap dapat membantu pemerintah desa meningkatkan pengelolaan keuangan desa.

Adapun indikator untuk menilai tingkat akuntabilitas aplikasi SISKEUDES berbasis CMS yang dipakai studi ini mengacu pada penelitian dari (Maharani & Akbar, 2020) yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal merupakan tanggung jawab pengelolaan kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pemerintah daerah, yang kemudian bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dengan adanya sistem keuangan desa berbasis CMS ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Bapak Lalu Danil membenarkan hal tersebut sebagai operator SISKEUDES. Beliau menyatakan bahwa dengan adanya fitur terbaru CMS di aplikasi SISKEUDES memberikan dampak dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. Berikut ini penjelasan Bapak Lalu Danil selaku operator SISKEUDES pada tanggal 3 Oktober 2024:

"Dengan adanya CMS SISKEUDES ini yang saya rasakan mampu meningkatkan akuntabilitas, karena kan CMS ini tu langsung dipantau secara real time oleh pihak PMD dan Bank daerah, jadi segala bentuk transaksi langsung bisa dilihat, jadi kita tidak bisa tu yang namanya bikin transaksi fiktif, nanti kan ada bukti history transaksi kita di bank juga, lalu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya kan bendahara tidak memegang uang tunai, jadi tidak ada yang namanya bendahara korupsi uang itu sejak ada CMS ini"

Dengan adanya SISKEUDES ini juga memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsi akuntabilitasnya kepada pihak atas, yaitu dengan mampu menghasilkan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang nanti akan dilaporkan ke pihak kecamatan setiap akhir tahun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Wanasaba Lauk Bapak Lalu Hardiansah pada tanggal 29 November 2024 :

"Semenjak adanya SISKEUDES ini kita terbantu sekali dalam pembuatan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang nantinya kita laporkan ke pihak kecamatan tiap akhir tahun, jadi kan laporan ini tidak lagi capek kita buat tidak seperti dulu saat menggunakan excel. Apalagi setelah ada CMS ini bisa meningkatkan akuntabilitas karena langsung dipantau oleh pemerintah pusat, karena tujuannya dikembangkan CMS ini kan ya untuk meningkatkan akuntabilitas"

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal, yaitu merupakan tanggung jawab yang ditujukan pada masyarakat desa. Dalam akuntabilitas ini, pemerintah desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas atau wewenang yang diberikan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 mengharuskan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi akuntabilitasnya baik kepada pihak atas ataupun kepada masyarakat bahkan sebelum adanya SISKEUDES. Dengan adanya SISKEUDES ini mempermudah pemerintah desa menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang dapat diandalkan untuk dilaporkan ke masyarakat lewat BPD. Hal ini disampaikan oleh Bapak Lalu Hardiansah selaku Kepala Desa pada tanggal 29 November 2024 :

"Jadi kalau untuk bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat itu sebelum SISKEUDES juga sudah kita laksanakan, karena memang peraturan sudah menegaskan hal itu, jadi cara yang kami lakukan adalah yang pertama dengan memasang baliho besar di depan kantor desa terkait APBDes tahun yang sedang berjalan, agar masyarakat tahu dana yang kita terima dan digunakan untuk apa. Dan juga dek kami tetap melaksanakan yang namanya Musyawarah Dusun (MUSDUS) untuk membahas RPJM Desa dengan kepala dusun, agar bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, kami juga tetap melaksanakan Musyawarah Desa terkait Evaluasi Kinerja Kepala Desa bersama BPD dengan membahas laporan pertanggungjawaban yang telah kami susun selama satu tahun. Jadi semenjak ada SISKEUDES ini bisa membantu kami dalam menyelesaikan penyusunan laporan pertanggungjawaban"

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dijabarkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa semenjak adanya SISKEUDES berbasis CMS ini dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa baik akuntabilitas vertikal yaitu kepada pihak atas ataupun akuntabilitas horizontal yaitu tanggung jawab kepada pihak bawah seperti kepada BPD dan masyarakat desa.

Hal ini membuktikan teori *stewardship* tidak terlepas dengan hubungan baik antara *steward* (pemerintah desa) dan prinsipal (masyarakat), yang menunjukkan bahwa pihak terkait adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri merupakan komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi karena kemampuannya dalam mengelola organisasi. Teknologi pengelolaan keuangan tingkat desa yang canggih seperti Siskeudes berbasis CMS. Aplikasi Siskeudes merupakan sistem informasi akuntansi yang dirancang untuk mendukung pemerintah desa dalam mengelola anggaran dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada daerah kabupaten atau kota melalui tokoh jalan dan kepada masyarakat melalui BPD. Laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan hubungan antara *steward* dan prinsipal.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian implementasi SISKEUDES berbasis CMS untuk meningkatkan tanggung jawab keuangan di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES berbasis *Cash Management System* (CMS) telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya prosedur yang lengkap, mulai dari modul perencanaan hingga modul pembukuan dan pembuatan laporan keuangan desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Namun masih ada kendala atau kekurangan yang dirasakan oleh operator SISKEUDES berbasis CMS ini, yaitu keterlibatan dua pihak yaitu bendahara dan operator SISKEUDES yang kadang *miss communication* dan kurangnya pelatihan yang diberikan pemerintah terkait CMS ini ke operator SISKEUDES, serta *error system* yang kerap terjadi sehingga menghambat pencairan gaji perangkat desa.

Akuntabilitas keuangan desa Wanasaba Lauk diukur dari akuntabilitas vertikal dan horizontal. Secara vertikal, akuntabilitas pemerintah desa Wanasaba Lauk dikatakan lebih akuntabel sejak

penerapan SISKEUDES berbasis CMS karena dengan fungsi CMS ini dapat diawasi langsung oleh instansi pusat (yaitu PMD dan perbankan) dan untuk akuntabilitas secara horizontal di Desa Wanasaba Lauk sudah dikatakan akuntabel bahkan sebelum adanya SISKEUDES, tetapi semenjak diterapkannya SISKEUDES ini sangat membantu pemerintah menyusun laporan keuangan yang kemudian dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mengkaji implementasi sistem keuangan tingkat desa berbasis CMS di Desa Wanasaba Lauk, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan ke lokasi lain. Sampai saat ini penelitian ini belum mengeksplorasi seluruh aspek akuntabilitas terkait penerapan aplikasi SISKEUDES berbasis CMS di Kantor Desa Wanasaba Lauk. Oleh sebab itu, rekomendasi untuk penelitian berikutnya akan memasukkan unsur tata kelola lain seperti transparansi, dan partisipasi masyarakat agar analisisnya dapat menyeluruh. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni M, H., Effendy, L., & Nurabiah. (2023). Efektivitas Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 67–81. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.18494>
- Agustin, T. (2024). *Rincian Dana Desa Kabupaten Lombok Timur 2024, Ada 8 Desa yang Mendapatkan Anggaran Lebih Dari Rp 2 Miliar*. RBTVCAMKOHA.COM. <https://rbtv.disway.id/read/54034/rincian-dana-desa-kabupaten-lombok-timur-2024-ada-8-desa-yang-mendapatkan-anggaran-lebih-dari-rp-2-miliar>
- Arfi, S. W., & Sandari, T. E. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Berbasis Cash Management System (Cms) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *GEMAH RIPA: Jurnal Bisnis*, 3(3), 64–74.
- Arief A, M. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 3(1). <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/jifa>
- Diana, P., Lestari, B. A. H., & Nurabiah, N. (2023). Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Penujak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 298–314. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.178>
- Enika NR, G., & Anny K, N. (2020). PENERAPAN CASH MANAGMENT SYSTEM SEBAGAI SISTEM BELANJA DI CABANG DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH MERAPI. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 11(November), 258–270.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Indrianti, R., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan di Desa Kertak Empat Kecamatan Pangaron. *Jurnal Eprints.Uniska*, 5(1), 1–10.

- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>
- Pujiani, E. S., L, B. A. H., & Astuti, W. (2022). Analisis efektifitas dan efisiensi penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) Dalam pengelolaan keuangan desa (Studi Kasus Pada Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Risma*, 2(3), 598–607. <http://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/risma/article/view/253/180>
- Sari, N., & Nirwana, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Pengendalian Internal dan Kompetensi SDM Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Sikap Qana'ah Sebagai Variabel Intervening di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal IAKP*, 4(2), 163–173.
- Utami P, O., Agustin, E., & Priyono, N. (2023). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(3), 65–75. <https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1489>
- Wibowo, H. T., Triyanto, D., & Sutojo, A. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(2), 152–165. <https://doi.org/10.24076/jspg.v2i2.416>